

Puan Berharap Presiden Jokowi Kirim Calon Panglima TNI Terbaik

JAKARTA (IM) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani berharap, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengirim ke DPR nama calon panglima TNI yang terbaik bagi organisasi TNI dan rakyat.

Puan meminta publik sabar menunggu nama calon panglima TNI yang akan dikirimkan presiden kepada DPR. Pemilihan panglima TNI, kata Puan, adalah hak prerogatif presiden.

"Siapa pun nama calon panglima TNI yang akan dikirim Presiden, DPR berharap dia adalah yang terbaik bagi organisasi TNI dan rakyat, sehingga TNI sebagai alat pertahanan negara bisa melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia," kata Puan dalam siaran pers, Senin (20/9).

Puan menyebut sejumlah tantangan yang memerlukan peran besar TNI, antara lain penanganan Covid-19 dan

pengendalian keamanan di Papua.

"Kita berharap panglima ke depan melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut," kata Puan.

Politikus PDI-P itu yakin, surat presiden (surpres) terkait calon panglima TNI akan dikirim ke DPR dalam waktu dekat mengingat DPR akan memasuki masa reses pada 7 Oktober 2021 mendatang.

Sesuai ketentuan undang-undang, DPR akan menyampaikan persetujuan paling lambat 20 hari setelah surpres diterima. Ia mengatakan, sikap DPR dalam persetujuan calon panglima TNI nantinya akan didasarkan pada kepentingan organisasi TNI dan kepentingan rakyat secara luas. "Bukan didasarkan kepentingan politik sempit, karena politik TNI adalah politik negara," kata Puan. ● han

2 Polhukam

IDN/ANTARA



Diduga Lakukan Pembohongan Publik, Lili Pintauli Dilaporkan ke Dewas KPK

Perbuatan Lili Pintauli yang berbohong dalam konferensi pers adalah pelanggaran kode etik. Perbuatan itu dinilai sangat merendahkan martabat dan marwah KPK.

JAKARTA (IM) - Empat pegawai nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar kepada Dewan Pengawas (Dewas) pada Senin (20/9).

Keempatnya adalah Rieswin Rachwell, Benedictus Siumlala Martin Sumarno, Ita Khoiriyah dan Tri Artining Putri. Mereka melaporkan Lili atas dugaan pembohongan publik yang dilakukan dalam konferensi pers pada 30 April 2021 yang menyangkal komunikasi dengan Walikota Tanjungbalai, M Syahril.

"Pernyataan LPS (Lili Pintauli Siregar) dalam konferensi pers tersebut jelas bertentangan dengan putusan Dewan Pengawas KPK," ujar Rieswin Rachwell, melalui keterangan pers, Senin (20/9).

Dalam putusan Dewas, Lili Pintauli dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan berkomunikasi dengan M Syahril yang merupakan pihak yang tengah berperkara di KPK. Menurut Rieswin, dalam putusan tersebut bahkan Lili Pintauli disebut menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi.

"Pelanggaran ini, melanggar ketentuan kode etik dan

juga ketentuan pidana dalam Undang-Undang KPK," katanya.

Rieswin berpendapat, perbuatan Lili Pintauli yang berbohong dalam konferensi pers adalah pelanggaran kode etik tersendiri. Perbuatan itu, menurut dia, juga merupakan perbuatan yang sangat merendahkan martabat dan marwah KPK selaku lembaga pemberantas korupsi yang seharusnya transparan dan jauh dari perbuatan berbohong.

"Kami melaporkan LPS kepada Dewas karena kami malu ada lagi Pimpinan yang melanggar kode etik di KPK," ujar Rieswin.

"Kami malu, ada lagi pimpinan yang terbukti melanggar kode etik dan masih saja tanpa malu berbohong, tetap menjabat dan tidak mengundurkan diri," ucapnya.

Sebelumnya, Lili Pintauli merespons sejumlah pem-

beritaan media massa yang menyatakan dirinya menjalin komunikasi dengan M Syahril. Adapun, M Syahril merupakan tersangka dalam kasus penerimaan hadiah atau janji terkait penanganan perkara Wali Kota Tanjungbalai tahun 2020-2021.

"Saya tegas menyatakan bahwa tidak pernah menjalin komunikasi dengan tersangka MS (M Syahril) terkait penanganan perkara yang bersangkutan, apalagi membantu dalam penanganan perkara yang sedang ditangani oleh KPK," ucap Lili dalam konferensi pers, Jumat (30/4) lalu.

"Saya berbohong karena malu ada lagi Pimpinan yang melanggar kode etik di KPK," ujar Rieswin.

"Kami malu, ada lagi pimpinan yang terbukti melanggar kode etik dan masih saja tanpa malu berbohong, tetap menjabat dan tidak mengundurkan diri," ucapnya.

Sebelumnya, Lili Pintauli merespons sejumlah pem-

PENETAPAN PAGU ALOKASI ANGGARAN RAPBN 2022

Menteri Sekretariat Negara Pratikno (tengah), Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kanan) dan Kepala Staf Presiden Moeldoko (kiri) bersiap mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/9). Rapat tersebut dalam rangka penetapan pagu anggaran menjadi pagu alokasi anggaran RAPBN Tahun 2022.

Lili menyatakan, dia sangat menyadari bahwa sebagai insan KPK, dia terikat dengan kode etik dan juga peraturan KPK yang melarangnya untuk berhubungan dengan pihak-pihak yang berperkara.

"Akan tetapi sebagai pimpinan KPK, khususnya dalam pelaksanaan tugas pencegahan, saya tentu tidak dapat menghindari komunikasi dengan seluruh kepala daerah," ucap Lili. "Dan komunikasi yang terjalin tentu saja terkait dengan tugas KPK dalam melakukan pencegahan supaya tidak terjadi tindak pidana korupsi," ujar Lili. ● han

LPSK Datangi Rumah Korban Pelecehan Seksual di KPI

JAKARTA (IM) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendatangi rumah MS, terduga korban pelecehan seksual dan perundungan di kantor KPI, Senin (20/9).

Kuasa hukum MS, Muhammad Muallimin mengatakan, ada dua petugas LPSK yang mendatangi rumah MS pada pukul 10.00 WIB.

"Ini merupakan tindak lanjut LPSK setelah menerima permohonan perlindungan dan jaminan keamanan dari korban MS hampir dua minggu lalu," kata Muallimin dalam keterangannya, Senin (20/9).

Muallimin mengemukakan, agenda hari ini adalah pendalaman dan penggalian keterangan lebih lanjut.

"Saya berharap perlindungan LPSK jadi obat penenang bagi korban bahwa sebagai pejuang keadilan dirinya wajib mendapat perlindungan dari negara. Orang-orang baik harus dibela oleh sistem hukum," kata Muallimin.

Kuasa hukum MS mempertanyakan investigasi internal yang dilakukan KPI dalam menangani dugaan kasus pelecehan seksual itu. Ketua tim kuasa hukum MS, Mehbob, menilai investigasi yang dilakukan KPI tidak serius dan meragukan.

"Tim kuasa hukum MS ragu atas hasil investigasi internal yang dilakukan KPI. Sebab, investigasi yang dipraktikkan KPI tidak mendalam, kurang detail, tak bersifat kronologis, tidak rekonstruktif, tidak cukup transparan dan menyeluruh," kata Mehbob, Jumat lalu. Mehbob mengatakan, in-

vestigasi yang dilakukan KPI lebih mirip seperti "ngobrol-ngobrol" yang tidak menjelaskan bagaimana tragedi pelecehan seksual dan perundungan terjadi.

"Investigasi itu tidak menjelaskan bagaimana awal mula peristiwa, mengapa dulu atasan mengabaikan laporan korban, siapa saja yang terlibat, siapa berperan apa, seperti apa kesimpulannya, dan apa rekomendasinya," katanya.

Kasus dugaan pelecehan seksual dan perundungan di KPI mencuat setelah terduga korban MS membuat surat terbuka yang kemudian viral pada 1 September 2021. MS dalam tulisan itu mengaku sudah menjadi korban perundungan oleh rekan kerjanya sejak bekerja di KPI pada 2012.

Pada 2015, ia menyatakan dilecehkan secara seksual oleh lima orang rekan kerjanya. MS mengaku sudah pernah melaporkan hal tersebut ke atasan dan Polsek Gambir pada 2019, tetapi laporannya tak pernah ditindaklanjuti.

Setelah surat terbukanya viral, KPI dan Kepolisian baru bergerak mengusut kasus itu. KPI langsung menonaktifkan delapan terduga pelaku pelecehan seksual dan perundungan terhadap MS untuk mempermudah investigasi internal.

Sementara itu, Polres Jakarta Pusat telah memeriksa lima terduga yang disebut telah melakukan pelecehan seksual terhadap MS pada 2015. Polres Jakarta Pusat juga melibatkan Propam untuk menyelidiki adanya dugaan pembiaran laporan yang pernah disampaikan MS ke Polsek Gambir. ● mei



FOTO: ANT

PENYESUAIAN RENCANA KERJA ANGGARAN KEMENTERIAN

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Ganip Warsito mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/9). Rapat tersebut dalam rangka penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian tahun 2022 sesuai hasil Banggar.

Ribuan Kapal Asing di Laut Natuna, Ini Penjelasan Ketua Bakamla

JAKARTA (IM) - Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Aan Kurnia mengklarifikasi informasi adanya ribuan kapal asing milik Tiongkok dan Vietnam yang beraktivitas di perairan Laut Natuna Utara, saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Senin (20/9).

Klarifikasi itu disampaikan Aan menyambung pernyataan Sekretaris Utama Bakamla S Irawan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi I beberapa waktu lalu. Dia menyebut, pernyataan Sestama merupakan akumulasi dari aktivitas kapal asing yang pernah bersinggah di Laut Natuna Utara.

"Itu akumulasi dari situasi di Laut Natuna Utara atau LCS. LCS kan luas sekali, berbatasan dengan 5 negara. Itu banyak," kata Aan.

Dia menyinggung tindak lanjut yang dilakukan TNI AL melalui Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) 1 Laskda TNI Arsyad Abdullah yang menyebut kondisi Laut Natuna dalam

keadaan aman dan terkendali. Tindak lanjut itu dilakukan setelah informasi yang diberikan Sestama Bakamla menjadi ramai diperbincangkan publik.

"Jadi apa yang dikatakan Angkatan Laut sudah benar," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Badan Keamanan Laut (Bakamla) menyebut ribuan kapal asing dari Vietnam dan Tiongkok yang tak tertangkap radar berada di daerah overlapping Laut Natuna Utara. Ribuan kapal tak terdeteksi radar. Hanya terlihat dengan pantauan mata.

Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut (Bakamla) S Irawan menyampaikan hal itu saat rapat dengan DPR terkait urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut.

"Begitu dilihat kasat mata ataupun langsung pengamatan udara, itu bahkan sampai ratusan, mungkin ribuan kapal yang ada di sana," ujarnya seperti dilihat di situs resmi DPR, Senin (14/9). ● mei

Masa Penahanan Bupati Nonaktif Probolinggo Puput Tantriana dan Suaminya Diperpanjang

JAKARTA (IM) - Masa penahanan Bupati nonaktif Probolinggo, Puput Tantriana Sari, dan suaminya, Hasan Aminuddin, yang merupakan anggota DPR RI, Senin (20/9), diperpanjang hingga 40 hari ke depan.

Puput dan Hasan merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada tahun 2021.

"Tim penyidik KPK telah memperpanjang masa penahanan untuk 40 hari ke depan, terhitung sejak 20 September 2021 sampai dengan 29 Oktober 2021," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Senin (20/9).

Selain itu, KPK juga memperpanjang penahanan tiga tersangka lain, yaitu Camat Krejengan Duddy Kurniawan, Kepala Desa Karangren Sumarto dan Camat Paiton Muhamad Ridwan.

Puput Tantriana Sari ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih sedangkan suaminya, Hasan Aminuddin ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1. Kemudian, Duddy Kurniawan ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat, Muhamad Ridwan ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan

dan Sumarto ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.

Ali menambahkan, KPK juga memperpanjang penahanan selama untuk 40 hari kedepan terhadap 11 tersangka lain dalam kasus ini di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur terhitung sejak 24 September 2021 sampai dengan 2 November 2021.

Sebelas tersangka tersebut yaitu Ali Wafa, Mawardi, Mashudi, Mohammad Bambang, Masruhen, Abdul Wafi, Kho'im, Ahkmad Saifullah, Jaelani, Uhar, dan Nurul Hadi. Kemudian, Dua orang tersangka ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur yakni Nurul Huda dan Hasan ditahan Rutan Polres Jakarta Timur.

Selain itu, empat tersangka lainnya ditahan empat rutan berbeda, Sugito di Rutan Salemba, Sahir di Rutan Polres Metro Jakarta Barat, Samsuddin di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih, dan Malih ditahan di Rutan Polda Metro Jaya.

"Perpanjangan penahanan ini diperlukan oleh tim penyidik untuk terus melengkapi dan mengumpulkan berbagai alat bukti, diantaranya pemanggilan berbagai pihak terkait sebagai saksi dalam berkas perkara para tersangka," ucap Ali. ● mei

KPK Amankan Uang hingga Dokumen dari Rumah Bupati dan Kadis PU Hulu Sungai Utara

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Abdul Wahid HK, yang berlokasi di Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Hulu Sungai Utara. Penggeledahan dilakukan sejak Minggu (19/9) hingga Senin (20/9) dini hari.

Tim KPK juga menggeledah rumah Plt Kadis PU Hulu Sungai Utara, Maliki, yang kini telah berstatus sebagai tersangka. Penggeledahan di 2 lokasi tersebut untuk mencari bukti tambahan kasus dugaan suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa pada Kabupaten HSU.

"Tim penyidik telah selesai melaksanakan penggeledahan di dua lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Senin (20/9).

"Dua lokasi tersebut yaitu rumah kediaman tersangka MI (Maliki) yang beralamat di Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Hulu Sungai Utara dan Rumah Dinas Jabatan Bupati Hulu Sungai Utara di Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Hulu Sungai Utara," ujarnya.

Dari penggeledahan tersebut, tim mengamankan uang, dokumen, serta barang elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara suap ini. Meski begitu, belum diketahui berapa jumlah uang yang diamankan dalam penggeledahan tersebut. Uang dan dokumen itu nantinya akan dianalisis terlebih dahulu sebelum dilakukan penyitaan.

"Dari lokasi ini, tim penyidik menemukan dan mengamankan sejumlah uang, berbagai dokumen dan barang elektronik yang diduga terkait dengan perkara," ujar Ali. "Bukti-bukti ini akan dicek untuk mengetahui lebih jauh keterkaitannya dengan para tersangka dan nantinya juga akan di lakukan penyitaan untuk melengkapi berkas perkara dimaksud," tuturnya.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek irigasi di Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan. Ketiganya adalah Plt Kadis Pekerjaan Umum (PU) HSU, Maliki (MK); Direktur CV Hanamas, Marhaini; dan Direktur CV Kalpataru, Fachriadi (FRI).

Dalam perkara ini, Maliki diduga telah menerima uang Rp345 juta dari sejumlah pihak yang disinyalir para pengusaha.

Uang itu di antaranya berasal dari Marhaini dan Fachriadi sejumlah Rp170 juta. Uang itu diduga merupakan komitmen fee karena perusahaan Marhaini dan Fachriadi telah mendapatkan proyek pekerjaan irigasi di Hulu Sungai Utara.

Selain dari Marhaini dan Fachriadi, KPK menduga Maliki menerima uang Rp175 juta dari pihak lainnya. Uang itu diduga masih berkaitan dengan proyek pekerjaan di Hulu Sungai Utara. KPK bakal mengusut pihak pemberi suap lainnya tersebut.

Atas perbuatannya, Maliki disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 64, Juncto Pasal 65 KUHP.

Sedangkan Marhaini dan Fachriadi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 65 KUHP. ● han



IDN/ANT

PENYESUAIAN RENCANA KERJA ANGGARAN KEMENTERIAN

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (kiri) bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini (tengah) dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PENGPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga (kanan) mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/9). Rapat tersebut dalam rangka penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian tahun 2022 sesuai hasil Banggar.